

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari isu kemiskinan, kemiskinan merupakan polemik yang selalu dialami setiap Negara, bahkan negara-negara yang maju sekalipun sebenarnya memiliki potensi akan kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan masalah utama, terutama bagi negara-negara berkembang. Bangsa Indonesia secara konsisten telah dikaitkan dengan upaya untuk mengentaskan maupun mengurangi tingkat kemiskinan, baik selama pembangunan Orde Lama maupun Orde Baru.

Menurut Sulistiyani (2017:12)

”Kemiskinan yang dihadapi oleh Orde Lama cenderung sangat gradual dan merata diseluruh Tanah Air, mengingat masa itu Indonesia baru saja terlepas dari cengkraman penjajah. Sedangkan kemiskinan yang dihadapi oleh Orde Baru lebih mencerminkan terjadinya ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan sehingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Setelah mengakhiri pelaksanaan pembangunan pada Orde Baru Indonesia dilanda krisis ekonomi yang terjadi berkepanjangan. Panjangnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh tiga faktor, faktor keadaan khusus, faktor *eksternal*, dan faktor *internal*. Faktor keadaan khusus yang disebabkan elnino yang terlalu panjang, sehingga menyebabkan bencana alam dan kekeringan. Faktor *eksternal* berlangsung bersamaan dengan bencana kekeringan yang menjadikan Indonesia mengalami krisis moneter, sedangkan dari faktor *internal* berupa konflik kebangsaan, disintegrasi yang melanda beberapa wilayah, program perekonomian, angka kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di Indonesia sampai saat ini, yang menimbulkan berbagai penyakit sosial

seperti banyaknya pengangguran, kejahatan, pelacuran dan kriminalitas Burlian (2016:14). Permasalahan utama kemiskinan di Indonesia dengan ditandai dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata diseluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah Nurkse (dalam Trisniwati 2012:34). Pemerintah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah prioritas karena memiliki dampak negatif dengan dimensi yang luas. Kemiskinan berdampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat penciptaan sumber daya manusia, menimbulkan beban sosial ekonomi bagi masyarakat. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (dalam Nursan 2020:1).

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, upaya tersebut untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 Ayat 1. Penanggulangan kemiskinan dengan beberapa program bantuan sosial yang setidaknya mengurangi dampak kemiskinan dan merupakan sebuah penanggulangan kemiskinan”.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan pemerintah khususnya Kabupaten Malang, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 “mencatat jumlah penduduk 2.564.448 jiwa dengan jumlah penduduk

miskin pada tahun 2018 pada angka 268,490 jiwa dengan presentase 11,7%, di tahun 2019 adanya penurunan berada pada angka 246,600 ribu jiwa dengan presentase 10,64%, sehingga mengalami penurunan 21,89 jiwa, namun pada tahun 2020 menjadi 265,560 ribu jiwa dengan presentase 11,56% sehingga meningkat 18,96 ribu jiwa”. Kenaikan angka kemiskinan menjadi acuan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia yang berakibat pada ekonomi masyarakat khususnya Indonesia .

Dampak akibat pandemi covid 19 Desa Gondanglei Kulon Kabupaten Malang mengalami peningkatan jumlah kemiskinan, Penduduk Desa Gondanglei Kulon berjumlah 13.689 jiwa dengan 44 RT dan 4 RW menurut Kementerian Sosial tahun 2020 “jumlah kemiskinan tiga tahun terakhir dari 2019 berjumlah 1005 jiwa dengan presentase 7,8%, dan mengalami penurunan 126 jiwa pada tahun 2020 dengan jumlah 879 jiwa dengan presentase 6,7%, sampai saat ini tahun 2021 dengan angka 879 jiwa”. Oleh karena itu upaya dari Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 tentang tata cara

Penetapan dan rincian Dana Desa pada setiap Desa serta petunjuk teknis penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh bapak Heri Hermawan selaku panitia pelaksana program Bantuan Langsung Tunai pada tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 20.00 wib.

“Dimana anggaran Dana Desa saat ini lebih menuju kepada bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk pembangunan infrastruktur tidak di dahulukan di karenakan anggaran Dana Desa di pangkas 30% untuk masyarakat miskin yang terdampak. Pada dasarnya Ada beberapa Program yang telah disalurkan bagi masyarakat miskin di Desa Gondanglegi Kulon seperti Program Bantun sosial yang seperti, Program-program yang telah ditetapkan pemerintah dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun Bantuan tersebut diberikan langsung dari dinas sosial berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui Dana Desa”

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak akibat Covid-19. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gondanglegi Kulon No.31 tahun 2021 calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) “ditetapkan sebanyak Seratus Tiga Puluh Empat kepala keluarga pada tahun 2021, dengan jangka waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dua Belas Bulan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa dengan besaran RP.300.000 Perbulan yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia” Calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan sosial dengan kriteria tidak mendapat bantuan lain seperti

Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemilik kartu Prakerja, yang mengalami kehilangan mata pencaharian (Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dengan mekanisme proses Pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon juga tidak luput dari beberapa permasalahan sebagaimana di kemukakan oleh bapak Herry Hermawan pada tanggal 7 oktober 2021 pada pukul 20.00 wib yang bertugas sebagai panitia pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

”Bahwa masih kedapatan penerima ganda dengan artian sudah menerima bantuan lain masih terdata dalam penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), tidak hanya itu yang sering ditemukan banyaknya permasalahan pada Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sama dengan nama penerima bantuan”.

Dengan demikian berdasarkan kondisi dan uraian diatas perlu menjadi perhatian pemerintah desa dalam upaya mengatasi permasalahan dalam Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik agar dapat menanggulangi, mengurangi angka kemiskinan di Desa Gondanglegi Kulon dari Penjelasan diatas maka penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)” di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis :

- a. Secara teoritis peneliti dapat mengambil pengalam dari penyusunan skripsi yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
- b. Dalam penelitian ini dapat diketahui mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

1.4.2 Secara praktis :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya dalam hal yang terkait dengan Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan maupun acuan guna penelitian yang sama di masa yang akan datang, maupun sebagai informasi baru yang dibutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk penambahan informasi terkait Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menjadi informasi bacaan dipergustakaan.